



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA KULU

RANCANGAN RENCANA KERJA
(RENJA)





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN LOA KULU

Jl. Mulyo Pranoto RT. 02 Desa Loh Sumber Telp. (0541) 6666538 KodePos 75571

SURAT KEPUTUSAN KECAMATAN LOA KULU

Nomor : P.645/KCLK/UMPEG/900.1.1.2/05/2024

T E N T A N G

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN LOA KULU

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Menimbang :

Bahwa Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan oleh Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Bahwa Rancangan RENSTRA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Loa Kulu;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu Tim Penyusun RENJA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan Loa Kulu;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 70 Tahun 2020 Tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Rencana Kerja Pembangunan Nomor: 22 Tahun 2023
11. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P-XX/BAPP/V/000.7.2/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Rencana Kerja Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, selanjutnya disebut dengan RENJA Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2025.

Kedua :

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Loa kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kecamatan Loa Kulu.

Ketiga :

Menunjuk Aparatur Sipil Negri (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 di Lingkungan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keempat :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LOA KULU
Pada Tanggal : 5 Maret 2024
Camat Loa Kulu,



H.ADRIANSYAH,SH
Pembina
NIP. 196810061989031006

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Loa Kulu

Nomor : P.645/KCLK/UMPEG/900.1.1.2/05/2024

Nama Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) di Lingkungan Dinas Perubahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 NO : P.645/KCLK/UMPEG/900.1.1.2/05/2024	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	H.Adriansyah,SH	Camat	Penanggung Jawab
2	Idramsyah, SE	Sekretaris Camat	Ketua
3	Khairuddinata,S.IP,M.SI	Kasi Pemerintahan (PEM)	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Sunarko,S.Pd	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	Anggota
5	Padli,S.Sos	Kasi Pelayanan Umum (PU)	Anggota
6	Syofian Juhri,SE	Kasi Kesejahteraan Sosial (Kessos)	Anggota
7	Fitria Handayani	Kasi Ketentraman Dan Ketertiban (Trantib)	Anggota
8	Halifah Tri Handayani, S.Sos	Kasubbag Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Anggota
9	Juni Warni	Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : LOA KULU
Pada Tanggal : 5 Maret 2024
Camat Loa Kulu,



H.ADRIANSYAH,SH
Pembina
NIP.196810061989031006

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji Syukur Kepada ALLAH Subhanallahu Wata,ala Tuhan Yang Maha Esa Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kecamatan Loa Kuludalam membina, melayani, serta memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang Mandiri, Sejahtera juga untuk dapat mengevaluasi kinerja SKPD ditahun-tahun sebelumnya. Diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD serta Pelayanan Kepada Masyarakat .

Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Loa Kulu untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025. Adapun keberhasilan dan tidaknya Rancangan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 ini, tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Dengan adanya Dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan berserta targetnya dapat dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan kinerja yang ada pada SKPD Kecamatan Loa Kulu yang nantinya mampu mewujudkan VISI dan MISI Kecamatan Loa Kulu.

Kami menyadari Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu masih banyak kekurangan-kekurangannya, oleh karena itu kami mohon masukan dari Stakeholder baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Dinas Instansi lainnya yang terkait serta pihak swasta dan masyarakat guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang strategis KecamatanLoa Kulu di masa yang akan datang.

Loa Kulu 15 Maret 2024
Camat Loa Kulu,



H.ADRIANSYAH,SH
Pembina

NIP.196810061989031006

DAFTAR ISI

Sampul Dokumen Perencanaan	1
Surat Keputusan Camat Loa Kulu	2 s/d 4
Kata Pengantar	5
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7 s/d 8
1.1 Latar Belakang.....	7 s/d 8
1.2 Landasan Hukum.....	9 s/d 10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	12
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I s/d II Tahun 2023.....	12
Tabel TC.29.....	13 sd 17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
Tabel TC. 30.....	19 s/d 25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPD.....	26 s/d 27
2.4 Reveuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
Tabel TC 31	28 s/d 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
Tabel TC. 32	37 s/d 40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41 s/d 42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
4.1 Program dan Kegiatan.....	43
Tabel TC.33.....	44 s/d 49
BAB V PENUTUP.....	50

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang diamanatkan serta Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B – 370/BAPP/V.1/065.II/02/2022, sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi Masyarakat. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan kedalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) dan mengacu kepada RKPD, yang memuat program, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam *Grand Strategy* pembangunan yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2022-2026 serta keberhasilan (*success story*) pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya.

Di dalam RPJMD Teknokratik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026, sesuai strategi dan arah kebijakan dimunculkan konsep Membangun Kabupaten dari Kecamatan yakni satu pendekatan baru yang merupakan terobosan dan juga pengejawantahan dari kebijakan pemerintah tentang bagaimana membangun Indonesia dari pinggiran. Secara garis besar konsep yang akan didorong di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagaimana memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis pemerataan kewilayahan dan juga penguatan peran masing stakeholder yang ada.

1. 2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Kecamatan dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

2.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Nomor: 22 Tahun 2023
10. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 247/SK-BUP/HK/2021 Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
11. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P-XX/BAPP/000.7.2/03/2004
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Loa Kulu selama tahun 2025 dengan berpedoman pada Rancangan RKPD dan Renstra Kecamatan.

2. Tujuan :

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kantor Camat Loa Kulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Kutai Kartanegara,

“ MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Loa Kulu telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dan telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

- a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
- b. Menyusun Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV, pelaksanaan kinerja Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), sebagaimana dijabarkan dalam table berikut ini:

Tabel TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Loa Kulu

Dari Lembar 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan Renja PD (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian 2024 Target Renstra-PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja- PD Tahun (2023)	Realisasi Renja-PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	Urusan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintah Daerah									
	Bidang Urusan Pemerintahan Kecamatan Loa Kulu									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	42,506,293,275.00	8,439,581,986.00	8,172,458,655	6,993,032,273	83%	8,172,458,655	23,605,072,914	56%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	864,639,715	31,867,000	168,927,943	31,867,000	19%	168,927,943	232,661,943	99,50
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	55,000,000	6,190,000	10,000,000	6,190,000	62%	10,000,000	22,380,000	99,33
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	20,000,000	0	0	0	0%	0	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	50,000,000	4,474,000	10,000,000	4,474,000	45%	10,000,000	18,948,000	99,42
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	50,000,000	5,356,000	10,000,000	5,356,000	54%	10,000,000	20,712,000	99,26
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	50,000,000	5,900,000	10,000,000	5,900,000	59%	10,000,000	21,800,000	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	509,639,715	4,980,000	103,927,943	4,980,000	5%	103,927,943	113,887,943	99,60
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130,000,000	4,967,000	25,000,000	4,967,000	20%	25,000,000	34,934,000	99,34
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34,937,161,560	7,026,912,312	6,977,432,312	6,033,247,873	86%	6,977,432,312	20,037,592,497	99,50
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	34,587,161,560	6,917,432,312	6,917,432,312	5,928,507,873	86%	6,917,432,312	19,763,372,497	99,99
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	100,000,000	0	100,000,000	0%	0	200,000,000	100%

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000	4,740,000	10,000,000	4,740,000	47%	10,000,000	19,480,000	99,68
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bu-lanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bu-lanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	300,000,000	4,740,000	50,000,000	-	0%	50,000,000	54,740,000	99,68
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	370,000,000	5,150,000	70,000,000	5,150,000	7%	70,000,000	80,300,000	22%
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	160,000,000	400,000	30,000,000	400,000	1%	30,000,000	30,800,000	100%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	210,000,000	4,750,000	40,000,000	4,750,000	12%	40,000,000	49,500,000	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Admin-istrasi Kepegawaian	0	3,200,000	0	3,200,000	0%	0	6,400,000	0%
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	3,200,000	0	3,200,000	0%	0	6,400,000	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	746,535,000	203,786,540.00	154,307,000	142,850,000	93%	154,307,000	500,943,540	67%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	12,500,000	2,485,000.00	2,500,000	2,485,000	99%	2,500,000	7,470,000	99,40
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Per-lengkapan yang diadakan	100,000,000	44,126,140	25,000,000	23,780,000	95%	25,000,000	92,906,140	100%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0	0	0%	0	-	0%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	224,000,000	59,123,500.00	46,000,000	39,470,000	86%	46,000,000	144,593,500	65%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	25,000,000	11,999,900.00	5,000,000	4,750,000	95%	5,000,000	21,749,900	100%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	28,500,000	5,400,000	5,500,000	4,750,000	86%	5,500,000	15,650,000	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	100,000,000	10,172,000.00	25,000,000	23,870,000	95%	25,000,000	59,042,000	100%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terse-lenggara	126,535,000	67,530,000	25,307,000	23,870,000	94%	25,307,000	116,707,000	99,63
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	130,000,000	2,950,000	20,000,000	19,875,000	99%	20,000,000	42,825,000	77,23
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	0	0	0%	0	-	0%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1,452,000,000.00	0	0	0	0%	0	-	0%
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1,122,000,000.00	0	0	0	0%	0	-	0%
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300,000,000.00	0	0	0	0%	0	-	0%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	30,000,000.00	0	0	0	0%	0	-	0%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	0	0	0	0	0%	0	-	0%

				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0	0	0	0%	0	-	0%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0	0	0	0%	0	-	0%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	2,960,957,000	967,485,134	586,791,400	563,377,400	96%	586,791,400	2,117,653,934	72%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	2,000,000	1,989,000	2,000,000	1,999,000	100%	2,000,000	5,988,000	99,45
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	577,500,000	149,711,184	115,500,000	112,987,000	98%	115,500,000	378,198,184	99,45
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,346,457,000	815,784,950	469,291,400	448,391,400	96%	469,291,400	1,733,467,750	97,97
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan	35,000,000.00	0	0	0	0%	0	-	0%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	1,175,000,000	201,181,000	215,000,000	213,340,000	99%	215,000,000	629,521,000	54%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	1,050,000,000	182,731,000	190,000,000	189,450,000	100%	190,000,000	562,181,000	93,35
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	125,000,000	18,450,000	25,000,000	23,890,000	96%	25,000,000	67,340,000	99,68
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0%	0	-	#DIV/0!
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0%	0	-	0%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	72,445,000,000	19,850,915,045	20,241,320,000	19,879,911,940	98%	20,241,320,000	59,972,146,985	83%
					Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0%	0	0	0%
					Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	0	0	0	0%	0	0	0%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	0	0	0%	0	0	0%
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	0	0	0%	0	0	0%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	620,000,000	101,513,105	120,000,000	118,646,000	99%	120,000,000	340,159,105	55%
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	120,000,000	4,762,005	20,000,000	19,756,000	99%	20,000,000	44,518,005	95,24
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	500,000,000	96,751,100	100,000,000	98,890,000	99%	100,000,000	295,641,100	99,95

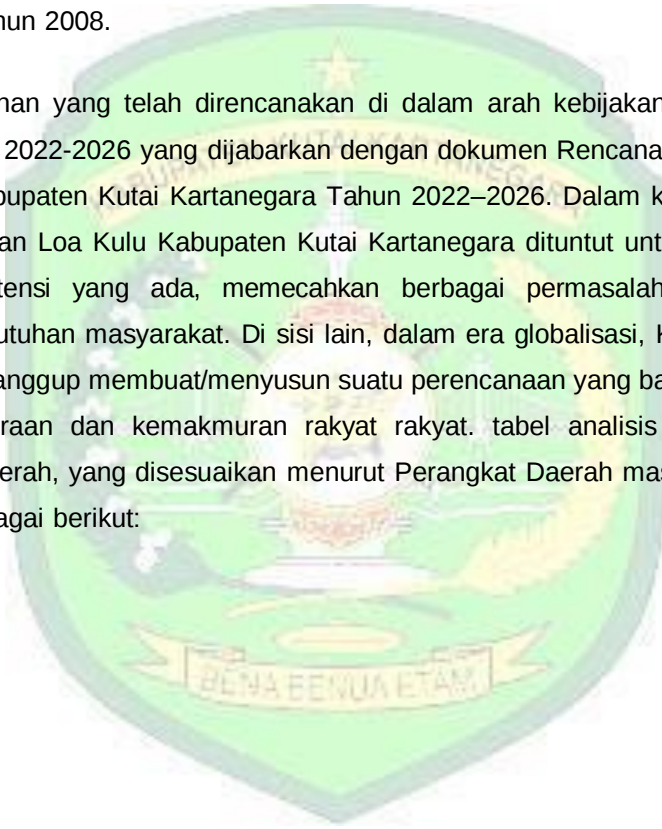
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	71,825,000,000	19,749,401,940	20,121,320,000	19,761,265,940	98%	20,121,320,000	59,631,987,880	83%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0	0	0	0	0	-	0%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	75,000,000	2,925,000	15,000,000	14,789,000	99%	15,000,000	32,714,000	44%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	71,750,000,000	19,746,476,940	20,106,320,000	19,746,476,940	98%	20,106,320,000	59,599,273,880	98,21
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	95,000,000	9,092,378,977	215,000,000	211,600,000	98%	215,000,000	9,518,978,977	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	95,000,000	9,092,378,977	215,000,000	211,600,000	98%	215,000,000	9,518,978,977	100%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	75,000,000	8,230,000	15,000,000	14,950,000	100%	15,000,000	38,180,000	100%
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan wilayah	0	0	0	0	0%	0	-	0%
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20,000,000	9,084,148,977	200,000,000	196,650,000	98%	200,000,000	9,480,798,977	100%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	820,000,000	24,492,100	205,000,000	24,544,000	12%	205,000,000	254,036,100	31%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	820,000,000	24,492,100	205,000,000	24,544,000	12%	205,000,000	254,036,100	31%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20,000,000	5,000,000	5,000,000	4,687,000	94%	5,000,000	14,687,000	73%
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	800,000,000	19,492,100	200,000,000	19,857,000	10%	200,000,000	239,349,100	30%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	800,000,000	8,230,000	200,000,000	198,670,000	99%	200,000,000	406,900,000	51%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	800,000,000	8,230,000	200,000,000	198,670,000	99%	200,000,000	406,900,000	51%
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	800,000,000	8,230,000	200,000,000	198,670,000	99%	200,000,000	406,900,000	100%

				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90,000,000	28,390,000	10,000,000	9,978,500	100%	10,000,000	48,368,500	54%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	90,000,000	28,390,000	10,000,000	9,978,500	100%	10,000,000	48,368,500	54%
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	90,000,000	28,390,000	10,000,000	9,978,500	100%	10,000,000	48,368,500	99,63
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0%	0	0	0%
						23,047,458,655	30,489,093,696	23,047,458,655	23,036,459,655	100%	23,047,458,655	23,047,458,655	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari capaian kinerja pelayanan Kecamatan Loa Kulu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 yang dijabarkan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022–2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Kecamatan Loa Kulu dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat rakyat. tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut:



Tabel TC.30.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)* Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan

Lembaran:

NO	Indikator*)	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nilai Sakip Perangkat Daerah												
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah perangkat daerah			376.892.000	168.927.943	173.927.943	173,927,943.00	0	31,867,000.00	37.027.500	41,296,000.00	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0	15.000.000	10.000.000	10,000,000.00	0	6,190,000.00	5,789,500.00	10,000,000.00	
2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun			0	0	0	0	0	0.00	420,775,000.00	5,000,000.00	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun			0	10.000.000	10.000.000	10,000,000.00	0	4,474,000.00	397,300,000.00	5,000,000.00	
4	Jumlah Dokumen DPA SKPD			0	10.000.000	10.000.000	10,000,000.00	0	5,356,000.00	470,783,000.00	5,396,000.00	
5	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD			0	10.000.000	10.000.000	10,000,000.00	0	5,900,000.00	481,000,000.00	5,900,000.00	
6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	93.927.943	103.927.943	103,927,943.00	0	4,980,000.00	490,500,000.00	5,000,000.00	
7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	30.000.000	30.000.000	30,000,000.00	0	4,967,000.00	356,900,000.00	5,000,000.00	
II	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			230.075.000	7.027.432.312	6.977.432.312	6,977,432,312.00	6.973.001.888	6,033,247,873.00	6.958.398.320	6,532,572,051.00	
1	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia			0	6.917.432.312	6.917.432.312	6,917,432,312.00	6.746.636.888	5,928,507,873.00	6.753.338.320	6,395,152,051.00	

2	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	0	0	0	0	100,000,000.00	100.000.000	5060000	
3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			230.075.000	10.000.000	10.000.000	10,000,000.00	226.365.000	4,740,000.00	5.060.000	0	

4	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0	100.000.000	50.000.000	50,000,000.00	0	0	100.000.000	132,360,000.00	
III	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			0	90.000.000	70.000.000	70.000.000	0	5,150,000.00	46,200,000.00	0	
1	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD			0	40.000.000	30.000.000	30.000.000	400,000.00	400,000.00	41,200,000.00		
2	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan			0	50.000.000	40.000.000	40.000.000	4,750,000.00	4,750,000.00	5,000,000.00		
IV	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			135.190.000	0	0	0	133.650.000	3,200,000.00	0	0	
1	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya			135.190.000	0	0	0	133.650.000	3,200,000.00	0	0	
V	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			238.830.200	379.307.000	348.307.000	154.307.000	236.392.100	203,786,540.00	316,820,000.00	344,536,000.00	
	Jumlah Komponen Listrik (Unit)			0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2,485,000.00	2,500,000.00	41,200,000.00	
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan			143.072.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	140.844.000	44,126,140.00	25,000,000.00	25,000,000.00	
	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia			78.795.900	40.000.000	40.000.000	46.000.000	78.586.800	59,123,500.00	40,000,000.00	40,000,000.00	
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia			16.962.300	5.000.000	5.000.000	5.000.000	16.961.300	11,999,900.00	15,000,000.00	14,516,000.00	
	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			0	6.500.000	5.500.000	5.500.000	0	5,400,000.00	5,500,000.00	0	

	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan			0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	10,172,000.00	0	0	
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara			0	25.307.000	25.307.000	25.307.000	0	67,530,000.00	25,000,000.00	200,000,000.00	
	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan			0	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	2,950,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	
	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200,000,000.00	20,000,000.00	
VI	Jumlah Barang Milik Daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Mebel yang diadakan			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			893.596.180	586.791.400	586.791.400	586.791.400	844.719.099	967,485,134.00	947.724.552	1,039,724,552.00	
VII												
	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1,989,000.00	2.000.000	2.000.000	
	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan			133.506.564	115.500.000	115.500.000	115.500.000	114.116.419	149,711,184.00	115.000.000	207,000,000.00	
	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			744.659.616	469.291.400	469.291.400	469.291.400	715.172.680	815,784,950.00	832.724.552	832,724,552.00	

	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			13.430.000	0	0	0	13.430.000	0	0	0	
VIII	Jumlah Barang Milik Daerah			687.582.000	315.000.000	215.000.000	215.000.000	373.335.000	201,181,000.00	0	250,000,000.00	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan			239.702.000	290.000.000	190.000.000	190.000.000	236.687.000	182,731,000.00	0	200,000,000.00	
	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	18,450,000.00	0	0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			422.880.000	0	0	0	136.648.000	0	0	50,000,000.00	

IX	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan			3.005.135.866	0	0	0	36.002.680.354	0	0	0	
X	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			0	0	0	0	0	0	0	0	
XI	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif			0	0	0	0	0	0	0	0	
XII	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			100.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	4,762,005.00	35.000.000	11,000,000.00	
	Jumlah Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	4,762,005.00	5.000.000	6,000,000	

	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	30.000.000	5,000,000.00	
XIV	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			2.905.135.866	20.299.960.000	31.859.550.000	14.325.000.000	36.002.680.354	19,749,401,940.00	31.844.550.000	42,001,296,000.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			0	0	0	0	0	0	0	5,000,000.00	
	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	2,925,000.00	0	891,296,000.00	

	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			2.905.135.866	20.284.960.000	31.844.550.000	14.310.000.000	36.002.680.354	19,746,476,940.00	31.844.550.000	41,105,000,000.00	
XIV	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			1.010.674.468	220.000.000	220.000.000	220.000.000	591.504.140	9,092,378,977.00	15.000.000	265,000,000.00	
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			1.010.674.468	220.000.000	220.000.000	220.000.000	591.504.140	9,092,378,977.00	15.000.000	265,000,000.00	
	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			87.390.600	15.000.000	15.000.000	15.000.000	65.208.000	8,230,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			923.283.868	5.000.000	5.000.000	5.000.000	526.296.140	9,084,148,977.00	0	250,000,000.00	

	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan wilayah			0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0		
XV	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0	0	0	
	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan wilayah di wilayah Kecamatan			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0	0	0	
XVI	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti			0	0	0	0	0	0			
XVI I	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			0	0	0	0	0	0	0	0	
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum			0	0	0	0	0	0	0	25,000,000.00	

XVI II	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik			0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28,390,000.00	25.000.000	25.000.000	
XIX	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan			0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28,390,000.00	25.000.000	25.000.000	
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			0	50.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	28,390,000.00	25.000.000	25.000.000	
	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			0	0	0	0	0	0	0	0	
					27.434.683.130	23,965,538,655.00	23.122.458.655	38.798.839.693	30.489.093.696	40.627.914.663	23.122.458.655	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi KPD.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam pasal 126 menerangkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati /Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan juga merupakan Perangkat Daerah Kabupaten / Kotayang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati /Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedang fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan kecamatan.
2. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di
3. Pelaksanaan koordinasi atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
4. Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
5. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Pelaksanaan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
7. Pelaksanaan pelayanan umum kepada masyarakat.
8. Pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas layanan umum di wilayah kecamatan.
9. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Pelaksanaan penatausahaan/urusan kesekretariatan kecamatan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kantor Camat Loa Kulu dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya:

1. Permasalahan Internal:
 - a. Kualifikasi staf yang masih belum sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi
 - b. Belum dapat dilaksanakannya beberapa point pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat Karena belum adanya petunjuk teknis serta belum disiapkannya tenaga teknis yang sudah terlatih.
2. Permasalahan Eksternal:
 - a. Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menyiapkan dan memiliki kelengkapan administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh setiap warga yang merupakan produk layanan pemerintah kecamatan.
 - b. Jarak antara desa-desa dan ibukota Kecamatan yang relative jauh serta jalur transportasi yang masih sulit dan mahal menyebabkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa masih belum maksimal dilaksanakan.
 - c. Belum maksimalnya keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam membantu kegiatan pemberdayaan dan pembangunan wilayah desayang menjadi lokasi kegiatan usaha perusahaan tersebut

Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada para staf kecamatan tentang tugas dan fungsi kecamatan serta keahlian yang harus dipelajari dan dimiliki oleh setiap staf
2. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
3. Melaksanakan jenis kewenangan yang sudah dapat dilaksanakan dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait jenis kewenangan yang belum bisa dilaksanakan
4. Melakukan sosialisasi kepada aparatur desa dan warga desa tentang pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta dokumen-dokumen lainnya yang memang harus dimiliki oleh warga masyarakat
5. Memaksimalkan rapat koordinasi pertriwulan dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa
6. Melibatkan pihak perusahaan dalam kegiatan Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka sinkronisasi rencana kegiatan pemerintahan desa yang bisa dibantu dilaksanakan oleh pihak perusahaan
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang status lahan KBK dan mengusulkan kepada pihak terkait untuk mengeluarkan sebagian lahan yang menjadilokasi kegiatan usaha masyarakat yang termasuk dalam lahan KBK agar bisa dimiliki dan diusahakan oleh masyarakat
8. Potensi Perkebunan Kelapa Sawit yaitu terdapatnya perkebunan kelapa sawit PT.Niaga Mas gemilang yang berlokasi di desa Jonggon dan PT Kota Bangun Play station yang berlokasi di Desa Sungai Payang Potensi Pertanian yaitu terdapatnya usaha pertanian padi sawah dan padi ladang di desa hampir disemua 15 Desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025
2. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan, Pada tahun anggaran 2025 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai Lampiran Tabel berikut ini

Tabel TC. 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah :Kecamatan Loa Kulu

Lembar :dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp) 2025	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74	8.222.628.603	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Loa Kulu	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		178,927,943.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang Disusun	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD yang Disusun	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Loa Kulu	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	103,927,943	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	103,927,943.00	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	25,000,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		6,813,338,320.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	1 Dokumen	6,753,338,320.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Loa Kulu	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang	1 Dokumen	7,983,762,153.00	Gaji dan TPP (Data Tahun 2024)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	10,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	4 Dokumen	146,880,000.00	Honor PA,PPK dan Bendahara, menyesuaikan SSH
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		81,200,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	41,200,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen	64,800,000.00	Menyesuaikan SSH Honor Pengguna Barang
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	1 Dokumen	40,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	1 Dokumen	40,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		0.00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Kulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Loa Kulu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	0	0.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		136,820,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Dokumen	2,500,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	1 Dokumen	10,000,000.00	Pengadaan Lampu Philip,Baterai besar dan kecil
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	25,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	2 Unit	100,000,000.00	Pengadaan Prenter,Scanner, Laktop, dan Hardisk Eksternal
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	40 Jenis	40,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Loa Kulu	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	35 Jenis	250,000,000.00	Pengadaan Perlengkapan Cetak KTP EL (Rp.50.000.000) Pengadaan ATK (50.000.000) Alat kebersihan (50.000.000) Makan Minum Rapat 50.000.000.dan makan Minum tamu 50.000.000.
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	15,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Loa Kulu	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	2500 Lembar	30,100,000.00	Kekurangan Anggaran Biaya Foto Copy Rutin
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedia Perundang-Undangan	720 Eksemplar	5,500,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Loa Kulu	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	720 Eksemplar	5,500,000.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Loa Kulu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	50 Kali	50,000,000.00	Pengadaan Makan Minum Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	25,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Loa Kulu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	40 Kali	525,000,000.00	SPPD Dalam Daerah 200.000.000. SPPD Luar Daerah 325.000.000.
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	3,820,000.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	100 Dokumen	20,000,000.00	SPPD, Foto Copy, Penjilidan dan Makan Minum Rapat
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	20,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30 Kegiatan	20,000,000.00	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	100	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah	100		
	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan dan Mesin yang di adakan	0	0	Pengadaan Mebel	Loa Kulu	Jumlah Mebel yang diadakan dan Mesin yang di adakan	0	150,000,000.00	Banyaknya Meja Kursi Kantor Yang sudah Rusak
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	0	0.00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	0	0.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	0	0.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	469,291,400.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	600 Lembar	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Loa Kulu	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	600 Lembar	2,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	115.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Loa Kulu	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72 Rekening	248,400,000.00	Biaya Jaringan Listrik 9 Rekening, Jaringan Internet 6 rekening , Rekening Air 2 Rekening
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	469,291,400.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	361 Orang	832,724,552.00	Kekurangan Anggaran Honor Non PNS (THL)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15	20,000,000.00	Kurang Anggaran Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah		-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Loa Kulu	Jumlah Barang Milik Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	8 Unit	190.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Loa Kulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	8 Unit	200,000,000.00	Kurang Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya

	Dinas Jabatan										Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	5 Unit	50,000,000.00	Pemeliharaan,AC ,Komputer,Prent er dan Laktop
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0.00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Loa Kulu	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	0	0.00	
		Loa Kulu	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	0	0		Loa Kulu	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	0	0.00	
		Loa Kulu	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	0	0		Loa Kulu	Pertumbuhan Pendapatan Asli	0	0.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0.00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Loa Kulu	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	0	0.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Loa Kulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi		10,000,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Loa Kulu	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	5,000,000.00	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	0	100,000,000.00	Evaluasi Hasil IKM dan Tindak Lanjut pelaksanaan IKM yang telah berjalan,belanja Makan Minum Rapat,Meja,Kursi dan PC
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15	5,000,000.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	15	10,000,000.00	Anggaran Biaya Survey Kepuasan IKM

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP		14,335,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	10,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	10,000,000.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	1 Kegiatan	15,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Loa Kulu	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	0	2,606,575,000.00	Biaya Oprasional Truk sampah,Honor Petugas Sampah, pembelian kendaraanSampa h Roda 3, Pembangunan Pagar TPS 3R ,Semenisasi Halaman TPS 3R dan Semenisasi TPA Desa Jembayan Tengah
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	170 kegiatan	14,310,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Loa Kulu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	1 Laporan	14,390,000,000.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Loa Kulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		65,000,000.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Loa Kulu	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa		65,000,000.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Orang	15,000,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Loa Kulu	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	100 Orang	25,000,000.00	Biaya Makan Minum Rapat Musrenbang
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	50,000,000.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	50,000,000.00	

	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	0.00	
	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0		Loa Kulu	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0.00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0	135,194,291.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	0		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	5,000,000.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	5,000,000.00	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	130,194,291.00	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Loa Kulu	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	280,000,000.00	Tambahan Biaya Makan Minum , Pakaian dan Uang Saku
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Loa Kulu	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	0	0.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	130,000,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Loa Kulu	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0		

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	130,000,000.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Loa Kulu	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 kegiatan	280,000,000.00	Kekurangan Anggaran Tambahan Makan Minum Paskib, Pakaian dan Uang Saku
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Loa Kulu	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	0	0.00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0	25,000,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	0		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	25,000,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	75,000,000.00	Kekurangan Anggaran Transportasi Turun ke Lapangan dalam rangka Pendampingan ke 15 Desa
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Loa Kulu	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	0	0.00	
					23.047.458.655						28,769,669,648.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow fuction*;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;
- c. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur;
- d. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah

Kebijakan Kabupaten

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-Kecamatan, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara --sekalius untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. Kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten dalam bidang Pelayanan diarahkan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang dapat diuraikan

Tabel TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Keterangan
1	Pembersihan Bahu Jalan Margahayu Menuju Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya	Panjang Jalan	1 paket	
2	Pembersihan Bahu Jalan Margahayu Menuju Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya	Panjang Jalan	1 Paket	
3	2. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya	Panjang Jalan	1 Paket	
4	3. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jonggon	Desa Jonggon Jaya	Panjang Jalan	1 Paket	
5	4. Pembersihan Bahu Jalan Desa Sungai Payang Menuju Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya	Panjang Jalan	1 Paket	
6	5. Pembersihan Bahu Jalan Desa Loh Sumber Menuju Jembayan Dalam	Desa Loh Sumber	Panjang Jalan	1 Paket	
7	6. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jembayan Dalam Menuju Sungai Payang	Desa Jembayan	Panjang Jalan	1 Paket	
8	7. Pembersihan Bahu Jalan Desa Margasari Menuju Sungai Payang	Desa Jembayan	Panjang Jalan	1 Paket	
9	8.Pembersihan Bahu Jalan Desa Jongkang Menuju Datar Rawa Desa Loa Kulu Kota	Desa Jongkang	Panjang Jalan	1 Paket	
10	Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Mulyo Pranoto	Desa Loh Sumber	Panjang Jalan	1 Paket	
11	Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Jalan	1 Paket	
12	Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Desa Sepakat	Desa Sepakat	Panjang Jalan	1 Paket	
13	1. Pembersihan Bahu Jalan Margahayu Menuju Jonggon Jaya	Desa Margahayu	Panjang Jalan	1 Paket	
14	2. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jonggon Jaya	Desa Jonggon Jaya	Panjang Jalan	1 Paket	
15	3. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jonggon	Desa Jonggon	Panjang Jalan	1 Paket	
16	4. Pembersihan Bahu Jalan Desa Sungai Payang Menuju Jonggon Jaya	Desa Sungai Payang	Panjang Jalan	1 Paket	
17	5. Pembersihan Bahu Jalan Desa Loh Sumber	Desa Loh Sumber	Panjang Jalan	1 Paket	

	Sumber Menuju Jembayan Dalam				
18	6. Pembersihan Bahu Jalan Desa Jembayan Dalam Menuju Sungai Payang	Desa Jembayan Dalam	Panjang Jalan	1 Paket	
19	7. Pembersihan Bahu Jalan Desa Margasari Menuju Sungai Payang	Desa Sungai Payang	Panjang Jalan	1 Paket	
20	8.Pembersihan Bahu Jalan Desa Jongkang Menuju Datar Rawa Desa Loa Kulu Kota	Desa Jongkang	Panjang Jalan	1 Paket	
21	Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Mulyo Pranoto	Desa Loh Sumber	Panjang Drainase	1 Paket	
22	Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Desa Loa Kulu Kota	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Drainase	1 Paket	
23	Pengangkatan sedimentasi Parit jalan Desa Sepakat	Desa Sepakat	Panjang Drainase	200 m	
24	Semenisasi Parit pinggir jalan RT 009	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Drainase	1 paket	
25	LANJUTAN PEMBUATAN PARIT PASANGAN DEPAN MASJID MENUJU MUHAMADIYAH RT.15	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Drainase	1 paket	
26	PEMBUATAN PARIT PASANGAN SAMPING POLSEK LOA KULU RT.08	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Drainase	1 Paket	
27	Pembangunan Saluran Drenase Jln Bengkuang	Desa Jembayan	Panjang Drainase	1 Paket	
28	Pembuatan Parit Drainase Jalan	Desa Jembayan	Panjang Drainase	1 paket	
29	Lanjutan pembuatan paret LDII/Suyud	Desa Ponoragan	Panjang Drainase	1 Paket	
30	Rehab Parit Depan Langgar Nuris Sidiq	Desa Jembayan	Panjang Drainase	1 Paket	
31	Pembuatan Parit Gang Taslim	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
32	Normalisasi Parit Suyadi (Alat Berat)	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
33	Lanjutan Parit Tamsir	Desa Loh Sumber	Panjang Drainase	1 Paket	
34	Rehab Parit Samping Rumah Pak Sugianto (DURKP)	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
35	Lanjutan Semenisasi Parit Samping Rumah Pak Jumeri (DURKP)	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
36	Rehab saluran irigasi Jln Poros	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
37	Semenisasi Parit Batas Desa Ponoragan - Sumbersari	Desa Ponoragan	Panjang Drainase	1 Paket	
38	Penyempurnaan parit Pembuangan SDN 009	Desa Ponoragan	Panjang Drainase	1 Paket	
39	PEMBUATAN DRAINASE	Desa Ponoragan	Panjang Drainase	1 Paket	
40	NORMALISASI PARIT	Desa Ponoragan	Panjang Drainase	1 Paket	

	BUNTUNG RT 02 DESA PONORAGAN				
41	PEMBUATAN PARIT PASANGAN JL. RAPAK PANJANG RT 002 DESA PONORAGAN	Desa Ponoragan	Panjang Drainase	1 Paket	
42	PEMBUATAN PARIT PASANGAN JL. MANUNGAL RT 006 DESA PONORAGAN	Desa Ponoragan	Panjang Drainase	200 M	
43	NORMALISASI PARIT RT 004 DESA PONORAGAN		Panjang Drainase	200 M	
44	<i>Pembutan Parit Kelompok tani Turap turap Beton</i>	Desa Ponoragan	Panjang Drainase	1 Paket	
45	<i>Pembuatan parit pasang jln Kendiwah</i>	<i>Desa Jongkang</i>	Panjang Drainase	1 Paket	
46	<i>Lanjutan Pembutan parit jln SMPN 06</i>	<i>Desa Jonggon</i>	Panjang Drainase	200 M	
47	<i>Pasangan batu parit Pembuangan Kelompok Tani RT 3</i>	<i>Desa Jembayan Dalam</i>	Panjang Drainase	200 M	
48	<i>Pasangan batu parit Pembuangan Kelompok Tani RT 4</i>	<i>Desa Jembayan Dalam</i>	Panjang Drainase	5Mx100M	
49	Lanjutan Rehab Boxculvert Jalan Amat Khasim	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	4Mx100M	
50	PERLU ADANYA PEMBUATAN DRAINASE BETON	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	4Mx100M	
51	PERLU ADANYA NORMALISASI SALURAN DRAINASE	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	1 PAKET	
52	PERLUNYA ADANYA PEMBANGUNAN	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	1 Paket	
53	PERLU NYA DI BANGUN DRAINASE	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	1 Paket	
54	BELUM ADANYA PEMBANGUNAN	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	1 Paket	
55	KONDISI SAAT INI PERLU DI BANGUN DRAINASE	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	1 Paket	
56	PERLU ADANYA PEMBANGUNAN DRAINASE P. 200 m x La. 65 cm x Lb 35 cm	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	1 Paket	
57	Pembuatan gorong2	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	1 Paket	
58	Normalisasi parit	<i>Desa Rempanga</i>	Panjang Drainase	1 Paket	
59	Parit Lanjutan Dari Rumah Pak Gunawan Ke Belakang Rumah Pak Aris	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
60	Parit Lanjutan Sampai Parit Besar Gang Mawar	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
61	Pembuatan Parit Cacing Menuju Parit Besar	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
62	Lanjutan Parit Pasangan	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
63	Lanjutan Parit	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
64	Pembuatan Parit Gang 1 Ke Parit Besar	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	

65	Semenisasi Gang	Desa Sumber Sari	Panjang Jalan	1 Paket	
66	Pembangunan Parit Pasangan		Panjang Drainase	1 Paket	
67	Pembangunan Parit Dari Rumah (Alm) Minem Sampai Rumah Budi Laksono	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
68	Pembuatan Parit Depan Langgar Menuju Rumah Pak Sari	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
69	Normalisasi Parit Sumber Rezeki	Desa Sumber Sari	Panjang Drainase	1 Paket	
70	LANJUTAN PEMBUATAN PARIT 7PASANGAN DEPAN MASJID MENUJU MUHAMADIYAH RT.15	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Drainase	1 Paket	
71	PEMBUATAN PARIT PASANGAN SAMPING POLSEK LOA KULU RT.08	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Drainase	1 Paket	
72	Pembuatan saluran Gorong-Gorong Jln Al-Hidayah	Desa Jembayan Tengah	Panjang Gorong-gorong	1 Paket	
73	Pembangunan Saluran Gorong-gorong Jln.Tudungan	Desa Jembayan Tengah	Panjang Gorong-gorong	1 Paket	
74	PEMBUATAN TURAP GG.USAHA TANI RT.23	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Turap	1 Paket	
75	PEMBUATAN TURAP JL. PADAT KARYA TANI RT.15	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Turap	1 Paket	
76	Peningkatan semenisasi gang putri	Desa Loa Kulu Kota	Panjang Jalan	1 Paket	
77	Pengerasan dan Semenisasi Gang Walet	Desa Jembayan Dalam	Panjang Jalan	1 Paket	
78	Pengerasan dan Semenisasi Gang Penumpukan Kayu	Desa Jembayan Dalam	Panjang Jalan	1 Paket	
79	PENINGKATAN WILAYAH EKS.KAYU MAS	Desa Loa Kulu Kota	Luas Jalan	1 Paket	
80	Rehab Jembatan Besi Penyebrangan Kekuburan Muslimin RT 12	Desa Sungai Payang	Panjang Jembatan	1 Paket	
81	Semenisasi jembatan gang Langgar	Desa Jembayan	Panjang Jembatan	1 Paket	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan, kebijakan pembangunan nasional di bidang aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan terus dilakukan secara nyata, melalui beberapa langkah berikut :

- a. Memperkuat manajemen dan sistem pelayanan publik
- b. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik;
- c. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik

2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah akan terus ditingkatkan melalui kebijakan berikut :

- a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah sejalan dengan prinsip *structure follow function*;
- b. Pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan;

2. **Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM aparatur; Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.**

1. Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi;
- b. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi;
- c. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah pusat dan daerah

Kebijakan Kabupaten

RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara ditujukan untuk menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar-Kecamatan, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah. Kecuali itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program. Kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten dalam bidang Pelayanan diarahkan pada percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
2. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;

5. Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Kecamatan Loa Kulu disusun dengan memperhatikan Kebijakan nasional serta juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sehingga program dan kegiatan Kecamatan Loa Kulu telah sesuai dengan kebijakan Kabupaten yang gunanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan :

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2022 s/d 2026. Namun tujuan Rencana Kerja lebih mengarah pada periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2023, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Masyarakat administrasi yang benar dan akurat
2. Terpenuhi pelayanan yang cepat, tepat dan nyaman.
3. Mewujudkan aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi
4. Mewujudkan hasil kinerja yang akuntabel
5. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas, akuntabel dan professional
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan akuntabel

Sasaran :

Sasaran ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Loa Kulu, antara lain:

1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat pemakai jasa layanan Masyarakat
2. Terwujudnya kepuasan Masyarakat sehingga dapat bekerja secara maksimal dalam melaksanakan pelayanan
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesionalisme.
4. Meningkatnya jasa layanan kualitas dan kemampuan sumberdaya aparatur.
2. Terpenuhi target waktu pelayanan dan meningkatnya kenyamanan Masyarakat

3. Program dan Kegiatan

Adapun rencana program pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rancangan Rencana Kerja Awal SKPD Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025.

Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Kantor Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Adapun Rumusan Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai tabel berikut:

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Loa Kulu

lembar 1 dari 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikati
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Loa Kulu	100	10,968,094,648.00	APBD		100	8,172,458,655.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Loa Kulu	100	178,927,943.00	APBD		100	168,927,943.00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Loa Kulu	2 Dokumen	10,000,000.00	APBD		2 Dokumen	10,000,000.00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Disusun	Loa Kulu	1 Dokumen	10,000,000.00	APBD		1 Dokumen	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Disusun	Loa Kulu	1 Dokumen	10,000,000.00	APBD		1 Dokumen	10,000,000.00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	10,000,000.00	APBD		1 Dokumen	10,000,000.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	10,000,000.00	APBD		1 Dokumen	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Loa Kulu	2 Dokumen	103,927,943.00	APBD		2 Dokumen	103,927,943.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Loa Kulu	1 Dokumen	25,000,000.00	APBD		1 Dokumen	25,000,000.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Loa Kulu	100	8,140,642,153.00	APBD		100	6,977,432,312.00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	Loa Kulu	1 Dokumen	7,983,762,153.00	APBD		1 Dokumen	6,917,432,312.00

9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	0	APBD		1 Dokumen	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	10,000,000.00	APBD		1 Dokumen	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	146,880,000.00	APBD		1 Dokumen	50,000,000.00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Loa Kulu	100	104,800,000.00	APBD		100	70,000,000.00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Loa Kulu	1 Dokumen	64,800,000.00	APBD		1 Dokumen	30,000,000.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Dilakukan Penatausahaan	Loa Kulu	1 Dokumen	40,000,000.00	APBD		1 Dokumen	40,000,000.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Loa Kulu	100		APBD		100	0
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Loa Kulu	60 Stel	0	APBD		0	0
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Loa Kulu	100	1,040,600,000.00	APBD		100	154,307,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik (Unit)	Loa Kulu	1 Dokumen	10,000,000.00	APBD		1 Dokumen	2,500,000.00
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	Loa Kulu	2 Unit	100,000,000.00	APBD		2 Unit	25,000,000.00
17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Loa Kulu	30 Jenis	0	APBD		30 Jenis	0
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia	Loa Kulu	35 Jenis	250,000,000.00	APBD		35 Jenis	46,000,000.00
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	Loa Kulu	2500 Lembar	30,100,000.00	APBD		2500 Lembar	5,000,000.00
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Loa Kulu	720 Eksemplar	5,500,000.00	APBD		720 Eksemplar	5,500,000.00
21	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Loa Kulu	50 Kali	50,000,000.00	APBD		50 Kali	25,000,000.00
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Terselenggara	Loa Kulu	40 Kali	525,000,000.00	APBD		40 Kali	25,307,000.00

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis Pada SKPD Yang Mendapatkan Penatausahaan	Loa Kulu	100 Dokumen	50,000,000.00	APBD		100 Dokumen	20,000,000.00
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Loa Kulu	30 Kegiatan	20,000,000.00	APBD		30 Kegiatan	0
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Loa Kulu	100	150,000,000.00	APBD		100	0
25	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Loa Kulu	5 Set	150,000,000.00	APBD		5 Set	0
26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang di pelihara	Loa Kulu	5 Unit	0	APBD		5 Unit	0
27	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangun Gedung/Kantor yang diadakan	Loa Kulu	1 Unit	0	APBD		1 Unit	0
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana,Prasarana Bangunan Gedung/Kantor yang diRehabilitasi	Loa Kulu	15 Unit	0	APBD		15 Unit	0
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Loa Kulu	100	1,103,124,552.00	APBD		100%	586,791,400.00
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Tersedia	Loa Kulu	600 Lembar	2,000,000.00	APBD		600 Lembar	2,000,000.00
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Loa Kulu	72 Rekening	248,400,000.00	APBD		72 Rekening	115,500,000.00
31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Loa Kulu	361 Orang	832,724,552.00	APBD		361 Orang	469,291,400.00
32	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Loa Kulu	20 Unit	20,000,000.00	APBD		0	0
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Loa Kulu	100	250,000,000.00	APBD		100%	215,000,000.00
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Jabatan Yang Mendapatkan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan	Loa Kulu	8 Unit	200,000,000.00	APBD		8 Unit	190,000,000.00
34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaratan dan Mesin lainnya yang mendapat Pemeliharaan	Loa Kulu	5 Unit	50,000,000.00	APBD		5 Unit	25,000,000.00
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Loa Kulu	1 Unit	0	APBD		0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	Loa Kulu	100	17,116,575,000.00	APBD	100	100	
2		Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	15	50	APBD	15	100	

		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Loa Kulu	5	5	APBD	5	100	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Loa Kulu	100	0	APBD		100	0
36	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif	Loa Kulu	15 Kegiatan	0	APBD		15 Kegiatan	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Loa Kulu	100	110,000,000.00	APBD		100	120,000,000.00
37	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Loa Kulu	15 Kegiatan	100,000,000.00	APBD		15 Kegiatan	20,000,000.00
38	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Loa Kulu	15 Kegiatan	10,000,000.00	APBD		15 Kegiatan	100,000,000.00
13	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Loa Kulu	100	17,006,575,000.00	APBD		100	14,325,000,000.00
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Loa Kulu	15 Kegiatan	10,000,000.00	APBD		15 Kegiatan	0
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Loa Kulu	15 Kegiatan	2,606,575,000.00	APBD		15 Kegiatan	15,000,000.00
41	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Loa Kulu	12 kegiatan	14,390,000,000.00	APBD		170 kegiatan	14,310,000,000.00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Loa Kulu	100	175,000,000.00	APBD		100	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	100	175,000,000.00	APBD		100	15,000,000.00
42	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Loa Kulu	100 Orang	25,000,000.00	APBD		100 Orang	15,000,000.00
43	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Loa Kulu	15 Kegiatan	150,000,000.00	APBD		15 Kegiatan	0
44	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta	Loa Kulu	15 Kegiatan	0	APBD		15 Kegiatan	0

		Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan							
45	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Loa Kulu	0	0	APBD		0	0
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	100	330,000,000.00	APBD		100	
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan	Loa Kulu	100	330,000,000.00	APBD		100	205,000,000.00
46	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	15 Kegiatan	50,000,000.00	APBD		15 Kegiatan	5,000,000.00
47	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	2 Kegiatan	280,000,000.00	APBD		2 Kegiatan	200,000,000.00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Loa Kulu	100	280,000,000.00	APBD		100	
16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Loa Kulu	2 Kegiatan	280,000,000.00	APBD		2 Kegiatan	200,000,000.00
48	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Loa Kulu	2 kegiatan	280,000,000.00	APBD		2 kegiatan	200,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Loa Kulu	100	75,000,000.00	APBD		100	
17	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Loa Kulu	100	75,000,000.00	APBD		100	10,000,000.00
49	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	15 Desa	75,000,000.00	APBD		15 Desa	10,000,000.00
50	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Loa Kulu	15 Desa	0	APBD		0	
					28,944,669,648.00				23,047,458,655.00

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 Ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Loa Kulu Tahun 2022-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun. Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Loa Kulu.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada tahun 2024. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Loa Kulu.

Demikian pula dengan tersusunnya Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 Kecamatan Loa Kulu ini juga masih terdapat kurang-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya, Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Loa Kulu, 15 Maret 2024
Camat Loa Kulu



H. ADRIANSYAH.SH

Pembina
NIP. 196810061986031006

